

**DAMPAK KEBIJAKAN BERNUANSA SYARIAH
BAGI PEMENUHAN HAK KELOMPOK MINORITAS KOTA
PADANG**

(Studi Kasus: Kelompok Nonmuslim Kota Padang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas



Oleh:

YELMIATI
1610832006

Dosen Pembimbing:

Tamrin, Drs, M.Si

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

ABSTRAK

Yelmiati. 1610832006. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Soisal dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, dengan judul skripsi “Dampak Kebijakan Bernuansa Syariah Bagi Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas Kota Padang (Studi Kasus: Kelompok Nonmuslim Kota Padang)”. Dibimbing oleh: Thamrin M.Si.

Kebijakan bernuansa Syariah adalah kebijakan berupa peraturan, himbauan, instruksi Bupati, Wali Kota, Gubernur hingga presiden yang mengandung kaidah dan nilai agama islam yang muncul di beberapa daerah di Indonesia sejak awal reformasi. Kebijakan bernuansa Syariah hari ini masih menjadi polemik. Berdasarkan lembaga survei nasional dan IDI, indikator Aturan tertulis yang membatasi kebebasan berkeyakinan signifikan membuat citra negatif bagi demokrasi, toleransi dan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak kebijakan bernuansa syariah bagi pemenuhan hak kelompok minoritas agama nonmuslim di kota Padang. Dalam penelitian ini menggunakan konsep Hak Minoritas dengan menggunakan metode Kualitatif, Dengan tipe penelitian studi kasus intrumental. Unit analisis penelitian ini adalah lembaga, kelompok, dan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam dan dokumentasi. teknik pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, kelompok agama non-muslim. menguji keabsahan dengan teknik triangulasi ahli dan lembaga terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan bernuansa Syariah berdampak bagi pemenuhan hak kelompok nonmuslim Kota Padang diantaranya masih terdapat kerancuan makna sehingga terjadi proses pembiasaan secara terpaksa maupun sukarela sebagai wujud eksklusivisme di ruang publik. Akibatnya kelompok nonmuslim mengalami diskriminasi pada hak-haknya. Bentuk resistensi muncul dari nonmuslim bersifat laten dan tidak berlanjut disebabkan oleh faktor 1.) karena proporsi tak dominan dalam mempengaruhi sistem menandakan hak kepentingannya belum terepresentatif. 2) masih banyak pemenuhan hak dasar kelompok minoritas nonmuslim yang belum terpenuhi secara maksimal. 3) Terjadi penguatan konservatisme agama mayoritas, posisi agama minoritas semakin terdegradasi. 4)Selanjutnya peran negara juga belum hadir secara aktif. Kehadiran kebijakan bernuansa Syariah tidak sensitif terhadap hak minoritas karena bersifat eksklusif. Langkah untuk memperbaiki citra demokrasi, toleransi dan kerukunan umat beragama adalah dengan mencabut atau merevisi Kebijakan bernuansa Syariah guna memperbaiki citra demokrasi di Kota Padang.

Kata Kunci: kebijakan bernuansa Syariah, demokrasi, Hak asasi Manusia, Hak Minoritas.

ABSTRACT

Yelmiati. 1610832006. Department of Political Science, Faculty of social Science and Political Science, University of Andalas, with the title of the thesis "The Impact of Sharia Nuanced Policies for Fulfilling the Rights of Minority Groups in the City of Padang (Case Study: Nonmuslim Group in the City of Padang)". Supervised by: Tamrin M.si

Shari'a policies are policies in the form of regulations, appeals, instructions from regents, mayors, governors and presidents which contain to Islamic religious values called sharia that emerged in several regions in Indonesia at the beginning of the reform era. Sharia nuanced policies today are still a polemic. Based on the index of Indonesia's Democracy, the index of tolerance and index of religious harmony, and other national survey is to show the indicators of its written rules that limit freedom of belief significantly create a negative image for democracy in West Sumatra. The purpose of this study was to determine the impact of the nuanced policy on the fulfillment of the rights of Nonmuslim religious minorities in the capital city of West Sumatra, Padang. In this study using the concept of Minority Rights by using a qualitative method, with the type of research is an instrumental case study. The unit of analysis for this research is an institution, group and citizen of Nonmuslim. The techniques of collecting data are used in-depth interviews and documentation. Testing the validity with the triangulation technique of experts and related institutions. The results of this study indicate that Sharia-based policies have an impact on the fulfillment of the rights of Nonmuslim groups in the city of Padang, including that there is still confusion in meaning, resulting in forced and voluntary habituation processes as a form of exclusivity in public spaces. As a result, Nonmuslim groups experience discrimination on their rights. The form of resistance arising from Nonmuslims is latent and does not continue due to factor 1.) because the non-dominant proportion in influencing the system indicates that their right of interest has not been represented. 2) There are still many basic rights fulfillment of Nonmuslim minority groups that have not been maximally fulfilled. 3) There has been a strengthening of the conservatism of the majority religion, the position of minority religions is increasingly degraded. 4) Furthermore, the role of the state is also not actively present. The presence of Sharia policies is not sensitive to minority rights because they are exclusive. Steps to improve the image of democracy, tolerance and religious harmony is to revoke or revise the Sharia policy in order to improve the image of democracy in the City of Padang.

Keywords: Sharia policies, Democracy, Human rights, Minority right.

